

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PEMBELAJARAN UNTUK MEWUJUDKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN

Makarius Erwin Bria
Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana
[e-mail : makarius.bria@staf.undana.ac.id](mailto:makarius.bria@staf.undana.ac.id)

ABSTRAK

Adanya globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang berubah secara cepat di abad ke-21 ini seolah-olah menyamarkan batas antarnegara di dunia. Di sisi lain, globalisasi cenderung bersifat memaksa dan membawa seseorang untuk bergabung di dalam satu komunitas global sehingga dapat dengan cepat bertukar informasi antarindividu. Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, PNG, Singapura, dan Timor Leste. Dengan melihat kondisi tersebut tampak semakin perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat agar mampu mempertahankan eksistensi keindonesiaan itu sendiri. Dalam membina upaya penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kepada warga negara.

Kata Kunci : warga negara, global, pembelajaran

Pendahuluan

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis yang menjadi beranda depan negara, dalam hal ini wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Prasojo, 2013:418). Namun, pada kenyataannya pembangunan wilayah perbatasan bisa dikatakan masih jauh dari sentuhan pemerintah. Kondisi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah perbatasan masih rendah. Oleh karena itu, masyarakat di daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto Negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia,

berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ketika kebhinnekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan teramcam keberadaannya (Mahifal, 2011:4).

Di lain sisi, fenomena globalisasi memberikan berbagai akses kehidupan yang lebih mudah bagi manusia dan dampaknya begitu kontras. Globalisasi semakin memudarkan batas ruang dan waktu, tentu juga akan memudarkan batas-batas kebudayaan sebagai identitas dari suatu bangsa, khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri. Memudarnya identitas sama halnya dengan mulai kehilangan jati diri. Pengaruh arus global membuat masyarakat semakin merasakan pengaruh dari bangsa lain yang berakibat kepada transmisi nilai oleh berbagai kepentingan yang tak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Melihat kenyataan tersebut, perlu adanya upaya yang dipakai untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Mengerucut pada peserta didik, diperlukan pembelajaran yang dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter ke-Indonesia-an serta mampu untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok sebagai alat untuk menguatkan wawasan kebangsaan peserta didik, terutama yang berdomisili di daerah perbatasan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa.

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara tergantung dari perilaku peserta didik itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa persiapan peserta didik sekolah untuk kewarganegaraan sering diabaikan dan tidak ditangani dengan baik (Dean, 2005, hal. 51). Keadaan seperti ini akan berdampak pada proses aktualisasi peserta didik setelah kembali pada kehidupan masyarakat. Apabila materi-materi yang disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan hanya mengulang materi dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, maka peserta didik akan mengalami kejemuhan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dapat ditarik simpulan bahwa materi yang ada sama persis dengan materi yang ada pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Padahal yang mereka butuhkan saat ini yaitu aktualisasi dari pengetahuan yang sudah mereka miliki agar dapat menjadi warga negara yang baik sesuai kehendak dari negara.

Era Revolusi Industri 4.0, kita Bersama yang kita kenal dengan *disruption era*. Selain itu, era revolusi industry 4.0 identik dengan *big data*, *internet of things*, *3D printing*, teknologi AI, serta *disruptive science and technology innovation*, yang ditandai dengan banyak aplikasi yang memberikan kita kemudahan diantaranya, grab, gojek, bukalapak, Airbnb, traveloka, Lazada, pegipegi.com, smart city dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang membuat ruang gerak manusia semakin sedikit dan membuat kita sering sekali mager (malas gerak) dikarenakan kita dibuaikan dengan segala kemudahan yang serba instan. Ruang komunikasi akan semakin terbatas karena kita jarang bertemu dengan teman dan orang lain. Setiap individu akan menjadi lebih individual dan kepekaan sosial akan semakin berkurang, karena banyaknya berita *hoax* yang berkembang di era distrupsi data. Hal

ini menjadi pertimbangan penting untuk perlunya penguatan dan peranan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun *civic conscience*, agar setiap individu yang ada di Indonesia merupakan seorang individu yang tidak hanya cerdas namun mempunyai karakter dan *social awareness* yang baik serta memiliki pemahaman yang benar terhadap konsepsi wawasan kebangsaan.

Metode

Metode penulisan ini menggunakan metode *library research*. Selanjutnya, menurut Zed (2004: 54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan sering adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku-buku mengenai wawasan kebangsaan, masyarakat perbatasan, pendidikan kewarganegaraan, kemudian didukung oleh beberapa data dari jurnal-jurnal tertentu serta artikel ilmiah, dan artikel lepas dari alamat web terpercaya. Jenis data yang diperoleh bersifat variatif, artinya gabungan dari data kuantitatif dan kualitatif.

Pembahasan

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas. Sehingga dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga Indonesia tanpa harus dikomando atau diperintah harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kewarganegaraan. Winataputra & Budimansyah (2012; Kariadi, 2017: 31), "Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "*nation and character building*". Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebijakan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. PKn bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai,

kONSEP, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Kesadaran bela negara merupakan hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara, sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya terhadap negara. Kesadaran tersebut akan menjadi modal sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (Purwaningsih, 2005). Setiap warga negara bahkan anak muda harus memperoleh pendidikan pendahuluan bela negara (Lukman & Audu, 2014, hal. 119). Apabila pendidikan pendahuluan bela negara tersebut untuk di Indonesia dapat dilaksanakan oleh Pendidikan Kewarganegaraan, maka setiap warga negara harus mendapatkan proses pendidikan yang di dalamnya diselenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai katalis untuk mengembalikan kepercayaan, perdamaian, dan persatuan dalam pikiran generasi muda untuk saling pengertian, menjadi tenaga kerja yang bermartabat, hidup bersama, menjunjung kebenaran, dan menumbuhkan rasa cinta untuk hidup berdampingan (Enu, 2017:36)

Secara sosiologis, Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpinan di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan generasi muda yang memiliki atak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ristekdikti, 2016:24).

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu, kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diimplementasikan dengan baik melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang berlandaskan pada tujuan pendidikan serta pemantauan pembelajaran melalui evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran PKn dapat dicapai dengan baik serta mampu membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, citacita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Sehingga, semakin berkualitas implementasi

pembelajaran PKn maka akan semakin baik kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memegang peranan penerus bangsa Indonesia.

Sosok kewarganegaraan yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdekayang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum.

Strategi Penguatan Wawasan Kebangsaan

Keterbatasan jarak dan waktu dewasa ini telah dapat dipangkas secara cepat, sehingga mempermudah arus migrasi barang dan jasa maupun manusia telah sedemikian rupa menjamah ranah sosial antar warga Negara di dunia, sehingga proses akulterasi menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dewasa ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia. Tentunya kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang bisa tergantikan oleh budaya global. Tidak hanya itu, dewasa ini semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 telah sedemikian nampak berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong dewasa ini cenderung tergantikan dengan budaya konvensasi atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Budaya musyawarah untuk mufakat cenderung semakin terpinggirkan oleh budaya voting untuk menentukan sebuah keputusan (Mahifal, 2011:2).

Kekuatan Bangsa Indonesia dalam konteks sosial budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhineka Tunggal Ika sebagai motto Negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ketika kebhinekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan terancam keberadaannya (Mahifal, 2011:4). Perlu adanya upaya penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste pada umumnya, dan terkhusus bagi peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri, mampu berpikir kritis, serta memiliki kepekaan sosial terhadap isu-isu global. Pembelajaran Pkn sebagai bentuk dari praktik pendidikan merupakan proses dinamis yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pendidik, peserta didik

(Mahasiswa), dan materi pembelajaran Dalam upaya membina kesadaran bela negara mahasiswa, kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan pada upaya bagaimana memotivasi mahasiswa agar memiliki motivasi dan antusiasme dalam mengkaji berbagai masalah kebangsaan dalam kaitannya dengan materi kebangsaan yang dikaji. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berbagai tindakan atau strategi dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam rangka membangun motivasi belajar mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kewarganegaraan

Referensi

- Dean, B. L. (2005). Citizenship education in Pakistani schools: Problems and possibilities. *International Journal of Citizenship and Teacher Education*, 1(2), 35–55.
- Enu, D. B. (2017). Civic education as catalyst for the sustenance of true federalism in nigeria. *International Journal of Advanced Research in Public Policy, Social Development and Enterprise Studies*, 2(1), 36–46.
- Kariadi, Dodik. (2017). Generasi Yang Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan Dan Nasionalisme Dalam Pembelajaran Pkn. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1. Nomor 2.
- Lukman, A. A., & Audu, H. (2014). Promoting sustainable development in Nigeria: Via civic education. *Journal of Education and Practice*, 5(34), 119–126.
- Mahifal. (2011). Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Pedagogik*. 1-16. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231806.
- Prasojo, Z. H. (2013). Dinamika masyarakat lokal di perbatasan. *Walisongo*. 21 (2). 417-336.
- Purwaningsih, E. (2005). *Pembinaan kesadaran bela negara sebagai salah satu upaya mencegah disintegrasi bangsa (Studi kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*. Universitas Indonesia.
- RISTEKDIKTI. (2016). Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Winataputra, Udin. & Dasim Budimansyah. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.